

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Secara geografis dan struktur geologi, Indonesia terletak pada kawasan rawan bencana atau berada di daerah zona merah. Jenis bencana di Indonesia di bagi dua yaitu bencana hidrometeorologi dimana bentuk bencananya yaitu bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan hutan, kekeringan dan cuaca ekstrim. Jenis kedua yaitu bencana geologi yang mana bentuk bencananya yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan tanah longsor.¹ Salah satu daerah di Indonesia yang berada di kawasan zona merah atau merupakan daerah yang rawan akan bencana alam adalah Provinsi Sumatera barat.

Peristiwa vulkanik dan tektonik yang terjadi sejak ribuan tahun lalu telah menjadikan Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang menjadi salah satu tujuan wisata domestik maupun manca negara. Bagaikan dua sisi mata uang, Sumatera Barat pun menjadi sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana alam, seperti banjir, erupsi gunung, longsor, gempa bumi dan tsunami.² Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki 19 kota atau kabupaten yang hampir semuanya memiliki potensi ancaman bencana berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

¹ Dokumen Risiko Bencana Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018

² Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Tabel 1.1
Penyebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat

No	Lokasi	Bencana					
		Gempa	Tsunami	Banjir	Gunung Api	Longsor	Kebakaran
	Kota Padang	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
2	Kota Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
3	Kota Bukittinggi	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi
4	Kota Padang Panjang	Potensi	-	-	Potensi	Potensi	Potensi
5	Kota Payakumbuh	-	-	Potensi	Potensi	-	Potensi
6	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	Potensi	Potensi
7	Kota Solok	Potensi	-	Potensi	-	-	Potensi
8	Kab. Padang Pariaman	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
9	Kab Agam	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
10	Kab. Pasaman Barat	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
11	Kab Pasaman	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
12	Kab Limapuluh Kota	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
13	Kab Tanah Datar	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
14	Kab Solok	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
15	Kab Solok Selatan	Potensi	-	Potensi	Potensi	Potensi	Potensi
16	Kab Pesisir Selatan	Potensi	Potensi	Potensi	-	Potensi	Potensi
17	Kab Sijunjung	-	-	Potensi	-	Potensi	Potensi
18	Kab Dhamasraya	-	-	Potensi	-	Potensi	Potensi
19	Kab Mentawai	Potensi	Potensi	-	-	Potensi	Potensi

Sumber : *Kajian Risiko Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2019*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat semuanya memiliki jenis potensi ancaman bencana alam yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki seluruh jenis potensi bencana yang ada. Selanjutnya disusul oleh daerah lainnya yang juga hampir memiliki seluruh jenis potensi bencana diantara salah satunya yaitu Kota Padang.

Kondisi Kota Padang dari segi klimatologi mempunyai iklim tropis dengan hujan turun hampir sepanjang tahun.³ Tidak hanya itu Kota Padang juga memiliki 5 sungai besar dan 16 sungai kecil didataran rendah yang kemungkinan dapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Selain itu, dari segi geologi secara tektonik Kota Padang terbentuk oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut Kota Padang menjadi rawan terjadinya gempa bumi bahkan berpotensi menimbulkan tsunami. ⁴Jika dibandingkan daerah lainnya, meskipun tidak hanya Kota Padang yang berpotensi tinggi dari bencana gempa bumi dan tsunami namun sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dengan kerapatan tinggi sehingga harus lebih waspada.⁵ Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang terancam akibat bencana gempa bumi dan tsunami di tujuh kabupaten/kota yang berada di pesisir barat Sumatera sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Terancam di Kab/Kota di Pesisir Barat Sumatera

No	Nama Daerah	Jumlah		
		Kecamatan	Kelurahan	Jiwa Terancam
1	Kab. Pesisir Selatan	10	57	245.916
	Kota Padang		78	508.804
3	Kab. Padang Pariaman	6	9	24.861
4	Kota Pariaman	3	51	25.029
5	Kab. Agam	1	3	20.644
6	Kab. Pasaman Barat	5	12	78.782
7	Kab. Mentawai	4	33	17.313
	Provinsi Sumatera Bara	37	243	921.349

Sumber : Rencana Kontigensi Menghadapi Bencana Tsunami Sumatera Barat tahun 2016

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah jiwa terancam akibat bencana gempa dan tsunami lebih banyak akan menelan korban di daerah Kota Padang dibandingkan 7 kabupaten/kota yang berada di pesisir barat Sumatera.

³ Rancangan Strategis BPBD Kota Padang tahun 2014-2019

⁴ *Ibid*

⁵ Dokumen rencana kontigensi Tsunami Provinsi Sumatera Barat tahun 2011

Jika dilihat dari ancaman bencana tsunami di Kota Padang dengan mencermati peta bahaya tsunami yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2013, menyatakan dari keseluruhan wilayah Kota Padang, sebesar 7.613 Ha atau 19,41% wilayah Kota Padang masuk dalam wilayah bahaya tinggi. Meskipun kurang dari 20% luas wilayah Kota Padang secara keseluruhan, akan tetapi wilayah kelas bahaya tinggi menutupi hampir sebagian besar wilayah pesisir pantai Kota Padang terutama di wilayah pusat-pusat penduduk dan aktifitas masyarakat.⁶ Disisi lain hambatan serius pada Kota Padang adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat kepanikan setelah terjadinya gempa besar dan juga bangunan-bangunan tinggi yang mungkin roboh dan menimpa komunitas di dalamnya. Maka dari itu perlunya suatu upaya dalam penanggulangan bencana guna mengurangi dampak atau risiko yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut. Salah satu cara dalam penanggulangan bencana adalah melakukan manajemen bencana.

Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkannya.⁷ Mengelola manajemen bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidental tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses.⁸ Dalam siklus manajemen bencana alam ada empat aktivitas yang sangat penting harus dilakukan oleh pemerintah

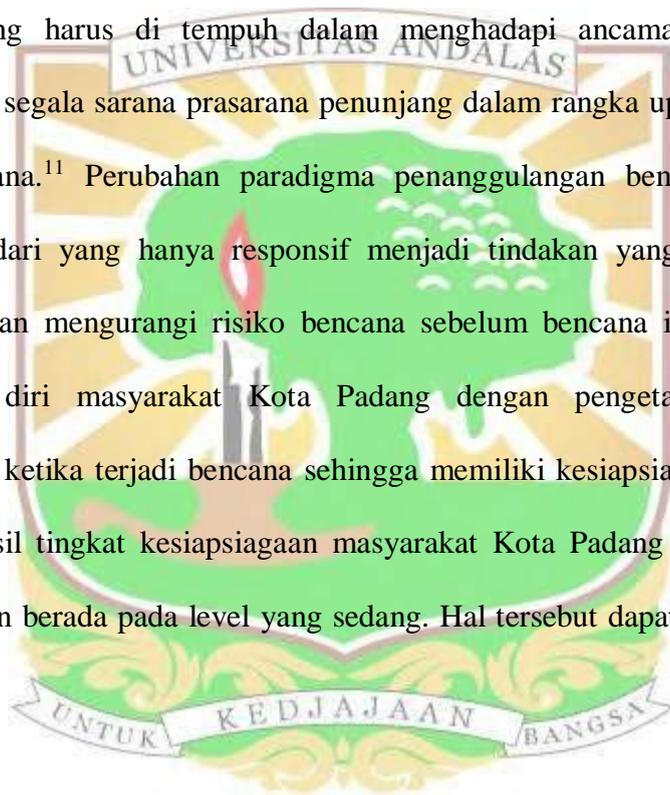
⁶ Novert, Ramadian, Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara hlm 14

⁷ Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana, Dian Rakyat, 2010, hlm 11

⁸ *Ibid*

dalam penanggulangan bencana diantaranya yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan atau sesuai dengan siklusnya yang terdiri dari fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.⁹ Dalam fase pra bencana maka fokus kegiatan penanggulangan bencana adalah upaya pencegahan dan mitigasi bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.¹⁰

Berdasarkan siklus manajemen bencana pada tahap pra bencana, maka jelas bahwa peran pemerintah sangat penting untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang potensi bencana, daerah aman bencana dan langkah yang harus di tempuh dalam menghadapi ancaman bencana serta menyiapkan segala sarana prasarana penunjang dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana.¹¹ Perubahan paradigma penanggulangan bencana kini sangat diperlukan dari yang hanya responsif menjadi tindakan yang preventif untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana sebelum bencana itu terjadi dengan membekali diri masyarakat Kota Padang dengan pengetahuan bagaimana menghadapi ketika terjadi bencana sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Menurut hasil tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang pada tahun 2017 menunjukkan berada pada level yang sedang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:



⁹Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava Media. Yogyakarta, 2014, hlm 21

¹⁰ Dokumen Kerangka Acuan Kerja sosialisasi penanggulangan bencana di daerah zona merah BPBD Kota Padang tahun 2018

¹¹ *Ibid*

Tabel 1.3
Tingkat Kesiapsiagaan Kota Padang

No	Jenis Bencana	Nilai Kesiapsiagaan	Tingkat Kesiapsiagaan
1	Gempa Bumi	0,63	Sedang
2	Tsunami	0,38	Rendah
3	Banjir	0,56	Sedang
4	Tanah Longsor	0,30	Rendah
5	Kekeringan	0,53	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,32	Rendah
7	Cuaca Ekstrim (angin puting beliung)	0,49	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,38	Rendah
9	Kegagalan Teknologi	0,27	Rendah
10	Banjir Bandang	0,46	Sedang
Nilai multi bencana		0,44	Sedang

Sumber : Laporan akhir kesiapsiagaan Kota Padang tahun 2017

Dari tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi seluruh bencana yang ada di Kota Padang berada pada level SEDANG dengan indeks 0,44. Pada beberapa jenis bencana tertentu seperti tsunami, tanah longsor, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta kegagalan teknologi Kota Padang masih memiliki tingkat kesiapsiagaan rendah.¹² Dengan demikian Pemerintah Kota Padang perlu melakukan upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk mengurangi risiko dari bencana yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya merupakan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang sesuai Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.¹³

¹²Laporan Akhir Kesiapsiagaan Kota Padang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2017

¹³Dokumen Sejarah BPBD Kota Padang tahun 2017

Pemerintah Kota Padang melalui BPBD Kota Padang berupaya meningkatkan kesiapsiagaan, pengetahuan dan partisipasi masyarakat kota Padang terkait bencana alam yang berpotensi ada sehingga dapat meminimalisir timbulnya risiko bencana dengan mengagas Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam. Di dalam program ini terdapat 19 kegiatan pada tahun 2018 yang dibagi pada tiga fase pelaksanaan kegiatan sesuai dengan siklus manajemen bencana yaitu pada fase pra bencana, fase tanggap, serta fase pasca bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4
Kegiatan-kegiatan dalam Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam tahun 2018 sesuai dengan fase penanggulangan bencana

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (fase pra bencana)				
No	Kegiatan	Anggaran	Target Kegiatan	Satuan
1	Sosialisasi penanggulangan bencana di daerah zona merah	Rp.421.015.952	14.250	Rumah
2	Pelatihan kelompok siaga bencana (KSB) kelurahan	Rp.218.921.000	197	Orang
3	Penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi	Rp. 40.956.500	22	Unit
4	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang	Rp.106.648.750	2080	Orang
5	Rakor Bidang Kebencanaan Nasional dan Daerah	Rp.238.270.000	507	Orang
6	Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho evakuasi	Rp.47.498.000	56	Unit
7	Pencegahan bahaya dan ancaman pada daerah rawan bencana (pemasangan plang daerah rawan bencana)	Rp.139.476.500	32	Unit
8	Tsunami Safe Zone	Rp.49.544.750	120	m2
9	Jambore pengurangan risiko bencana bagi kelompok siaga bencana	Rp.86.901.750	400	Orang
10	Sekolah cerdas bencana	Rp.276.855.250	47	Sekolah
11	Peringatan hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)	Rp.48.032.550	95.000	Peserta
Bidang kedaruratan dan logistik (fase tanggap darurat)				
1	Perawatan berkala sirine peringatan dini tsunami	Rp.147.525.000	20	Unit
2	Peremajaan dan optimalisasi pusat kontrol sirine/pusdalops	Rp.856.421.900	30	Personil
3	Penyediaan peralatan perlengkapan kebencanaan	Rp.139.476.500	32	Unit
4	Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan	Rp.129.871.600	7	Jenis
5	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp.854.980.000	12	Bulan
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi (fase pasca bencana)				

1	Pengendalian dan pengawasan bencana alam	Rp.101.428.050	96	Monitoring
2	Pelatihan damage and losses assessment (DALA)	Rp.44.487.000	35	Orang
3	Pemeliharaan Shelter	Rp.124.992.900	5	Shelter/Potensial Shelter

Sumber : Rancangan Kerja BPBD Kota Padang tahun 2018

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa dalam program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam ini pelaksanaannya dilakukan oleh tiga bidang yang sesuai dengan fase dalam penanggulangan bencana dan struktur organisasi yang ada pada BPBD Kota Padang. Pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdapat 11 kegiatan Kedua pada bidang kedaruratan dan logistik terdapat 5 kegiatan. Terakhir pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat 3 kegiatan di tahun 2018.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada fase pra bencana sebab fase ini merupakan langkah awal dalam upaya pengurangan risiko bencana agar mampu mengurangi risiko dari dampak yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut baik materil maupun jiwa. Kegiatan pada tahap pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.¹⁴ Besar kecilnya usaha yang dilakukan di dalam penanggulangan bencana di fase pra bencana akan sangat mempengaruhi seberapa besar dampak dan risiko nantinya dari suatu kejadian bencana.

Sesuai dengan visi BPBD Kota Padang yaitu “Menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana” maka dapat dilihat bahwa saat ini BPBD Kota Padang tengah menyiapkan masyarakat Kota Padang sebagai masyarakat yang memiliki

¹⁴ Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, Bandung, ALFABETA

pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang berpotensi ada di Kota Padang dan cerdas dalam bagaimana menyikapi ketika terjadi bencana.¹⁵ Hal ini juga dijelaskan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“... untuk saat ini kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat kita terhadap ancaman bencana dan bagaimana cara menyikapi ketika terjadi bencana memang masih rendah. Namun kami terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Padang ini agar memang betul-betul siap dalam menghadapi bencana dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, simulasi dan juga peningkatan infrastruktur pendukung lainnya”¹⁶

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa saat ini BPBD Kota Padang tengah berfokus pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana dengan memaksimalkan pelaksanaan dari setiap kegiatan-kegiatannya sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang. Sesuai yang diamanatkan oleh peraturan daerah Kota Padang nomor 03 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana pada pasal 34 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana terdapat tiga aktivitas yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.¹⁷ Dalam perda tersebut pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada aktivitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebab ini berada di fase pra bencana dan dikelola oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sedangkan aktivitas peringatan dini dikelola oleh bidang kedaruratan dan logistik.

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Wawancara peneliti dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Padang bapak Drs. Henry, M.Si tanggal 24 Juni 2019

¹⁷ Peraturan daerah Kota Padang nomor 03 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam pada fase pra bencana ini secara umum bertujuan untuk mengurangi segala risiko dan dampak dari bencana alam yang berpotensi ada di Kota Padang. Namun saat ini BPBD Kota Padang tengah berfokus untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang terhadap bencana yang berpotensi tinggi terjadi di Kota Padang. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1
Penentuan Bencana Prioritas berdasarkan Rencana Penanggulangan
Bencana Kota Padang

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS KECEENDERUNGAN	MENURUN		TANAH LONGSOR; KEKERINGAN; KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI
	TETAP		EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT; SAGAL TEKNOLOGI	TSUNAMI ; CUACA EKSTRIM;
	MENINGKAT			GEMPABUMI; BANJIR

■ BENCANA NONPRIORITAS
■ BENCANA PRIORITAS

Sumber : Dokumen Renstra BPBD Kota Padang tahun 2014

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dari sekian banyak bencana yang berpotensi ada di Kota Padang yang saat ini menjadi prioritas BPBD Kota Padang dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ini adalah bencana tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi dan banjir dengan indeks kebencanaan yang cenderung meningkat dan mengancam masyarakat Kota Padang.¹⁸ Dari empat bencana yang menjadi prioritas tersebut, peneliti memfokuskan pada bencana gempa bumi dan tsunami sebab dampak atau kerugian dari risiko yang ditimbulkan dari bencana

¹⁸ Dokumen Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tahun 2017

gempa bumi dan tsunami sangat besar dibandingkan bencana lainnya dan tidak memiliki *early warning* atau peringatan dini, dengan kata lain tidak dapat diprediksi kapan dan seberapa besar akan terjadi.

Pada tahun 2005, Kota Padang telah disorot sebagai kota yang sangat rawan terhadap ancaman bencana tsunami, yang disebabkan oleh pelepasan energi yang mungkin terjadi pada zona subduksi. Menurut penelitian ahli kegempaan Kerry Sieh dan Danny Hilman tahun 2011, gempa berkekuatan 8.9 SR diprediksi akan memicu tsunami dengan ketinggian sampai 10 m dari permukaan laut. Dari hal tersebut jika tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang maka akan berdampak pada tingginya jumlah kerugian dari bencana ini baik dari materil maupun jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dari perkiraan risiko dan dampak yang terjadi dari bencana tsunami sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perkiraan dampak yang terjadi

Bahaya	Potensi luasan		Potensi penduduk		Potensi kerugian dan lingkungan rusak			
	Total luas(ha)	Kelas	Penduduk terpapar (jiwa)	Kelas	Total kerugian(juta rupiah)	Kelas	Kerusakan lingkungan (ha)	Kelas
Banjir	11,619	Tinggi	388,091	Tinggi	1,619,893	Tinggi	8,174	Tinggi
Tsunami	6,44.67	Tinggi	273,755	Tinggi	1,125,047	Tinggi	2,668.65	Tinggi

Sumber : Dokumen rencana kontijensi Kota Padang menghadapi bencana tahun 2017

Dari tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa perkiraan dampak yang terjadi akibat bencana tsunami di Kota Padang cukup tinggi dengan potensi kerugian yang cukup besar dan juga penduduk terpapar yang jumlahnya tinggi. Menurut catatan dari pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana (PUSDALOPS-PB) Kota Padang terjadi peningkatan kejadian gempa yang terjadi

di Kota Padang dengan kekuatan rata-rata diatas 5 Skala Richter. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.6
Rekapitulasi kejadian gempa skala >5 sr di Kota Padang tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah kejadian
2014	9
2015	11
2016	17
2017	23
2018	31

Sumber : Pusdalops PB BPBD Kota Padang

Dari tabel 1.6 dapat dilihat bahwa kejadian gempa di Kota Padang mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya dengan kekuatan di atas 5 SR. Beberapa kejadian gempa besar juga pernah terjadi di Kota Padang dan menimbulkan kerugian materil dan jiwa yang cukup besar, salah satu diantaranya gempa pada tahun 2009 dengan kekuatan 7,9 yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 383 jiwa, luka berat 431 jiwa, luka ringan 771 jiwa dan kerusakan bangunan dengan rincian rusak berat 33.597 unit, rusak sedang 35.816 unit dan rusak ringan 37.615 unit.¹⁹ Berikut gambaran kejadian ketika bencana gempa pada tahun 2009 tersebut:

Gambar 1.2
Kejadian bencana gempa Kota Padang tahun 2009



Sumber : Dokumentasi BPBD tahun 2018

¹⁹ Dokumen Sejarah Bencana BPBD Kota Padang tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat kejadian gempa yang luar biasa pernah terjadi di Kota Padang. Hal ini menempatkan Kota Padang sebagai kota yang cukup memiliki ancaman tsunami yang tinggi di dunia karena 60% kepadatan penduduk kota Padang yang sangat tinggi berada di sepanjang pesisir pantai.²⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang 6 kecamatan diantaranya merupakan daerah zona merah atau daerah yang memiliki tingkat ancaman terpapar bencana gempa bumi dan tsunami lebih tinggi dari daerah lainnya.²¹ Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.7
Luas Area Terdampak dan Potensi Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya Tsunami di Kota Padang

Kecamatan	Luas bahaya (ha)			Kelas	Penduduk terpapar (jiwa)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi			
Bungus teluk kabung	-	-	974,70	Tinggi	3.774	Sedang
Koto Tengah	-	-	523,17	Tinggi	10.600	Tinggi
Lubuk Begalung	-	-	145,08	Tinggi	1.929	Tinggi
Padang Barat	-	-	237,96	Tinggi	6.503	Tinggi
Padang Selatan	-	-	207,27	Tinggi	10.442	Tinggi
Padang Utara	-	-	192,24	Tinggi	21.515	Tinggi
Kota Padang	-	-	2.280,42	Tinggi	54.733	Tinggi

Sumber : Dokumen Rencana Kontijensi Tsunami Kota Padang Tahun 2017

Dari tabel 1.7 diatas dapat dilihat bahwa dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, 6 kecamatan diantaranya merupakan daerah yang rawan terpapar dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami dengan kelas bahaya yang tinggi. Artinya hampir sebagian besar masyarakat Kota Padang berada di daerah kawasan zona merah atau rawan akan bencana gempa bumi dan tsunami. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ancaman dari bencana gempa bumi dan tsunami ini perlu

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

mendapat perhatian serius dari BPBD Kota Padang untuk bisa mengurangi risiko dampak dari bencana yang akan timbul dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan.

Maka dari itu, beberapa kegiatan di dalam Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam ini lebih banyak berfokus pada pengurangan risiko bencana gempa dan tsunami. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ini pada tahun 2018 terdapat 11 kegiatan pada fase pra bencana yang mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kota Padang terhadap potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami baik melalui upaya mitigasi secara struktural atau pembangunan fisik dan juga mitigasi non struktural atau pemberian edukasi dan serangkaian kegiatan dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 1.8
Kegiatan-kegiatan di dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di fase pra bencana tahun 2018

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di fase pra bencana					
No	Kegiatan mitigasi structural	Keterangan	No	Kegiatan mitigasi non structural	Keterangan
1	Penyediaan rambu-rambu jalur evakuasi	Merupakan kegiatan perencanaan dan pengadaan petunjuk atau rambu untuk mengarahkan penduduk ke jalur dan tempat evakuasi yang benar dalam waktu yang cepat	5	Sosialisasi penanggulangan bencana di daerah zona merah	Merupakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dari rumah ke rumah yang berada di daerah zona merah tsunami.
2	Pemeliharaan rambu-rambu dan baliho	Merupakan kegiatan pengecekan dan	6	Pelatihan kelompok siaga bencana (KSB)	Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan KSB

	evakuasi	penggantian rambu-rambu serta baliho evakuasi yang rusak		kelurahan	yang akan mensosialisasikan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana kepada masyarakat di daerahnya
3	Pemasangan plang daerah rawan bencana	Merupakan kegiatan penyediaan Papan informasi yang dibuat berisi terkait pengetahuan tentang gempa dan tsunami, sekaligus apa saja yang mesti dilakukan pada saat bencana gempa dan tsunami terjadi.	7	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Merupakan kegiatan sosialisasi dan simulasi yang diinisiasi oleh BNPB yang dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat menuju budaya aman bencana dengan melakukan edukasi publik melalui gerakan kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan seluruh komponen pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, serta khususnya keluarga dan individu itu sendiri setiap tanggal 26 April.
4	Tsunami Safe Zone	Merupakan kegiatan pemasangan perkiraan batas akhir zona aman tsunami yang dipasang pada 20 titik ruas jalan evakuasi utama Kota Padang	8	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang	Merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh BPBD Kota Padang sebagai hari peringatan bencana gempa bumi dan tsunami pada setiap tanggal 30 september yang juga dilakukan kegiatan simulasi terhadap masyarakat Kota Padang
			9	Rakor Bidang Kebencanaan Nasional dan Daerah	Merupakan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral dengan insan kebencanaan sebagai upaya koordinasi, evaluasi dan kesiapsiagaan serta inisiatif untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan risiko bencana antar pelaku kebencanaan.
			10	Jambore	Merupakan kegiatan

				pengurangan risiko bencana bagi kelompok siaga bencana	perlombaan bagi KSB guna menguji sejauh mana pengetahuan dan kapasitas mereka dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.
			11	Sekolah cerdas bencana	Merupakan kegiatan sosialisasi dan simulasi ke siswa-siswa sekolah yang berada di daerah zona merah

Sumber: Dokumen rencana kerja BPBD tahun 2018

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan ditabel 1.8 dapat dilihat BPBD telah berupaya dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat agar dapat mengurangi risiko bencana gempa bumi dan tsunami melalui serangkaian kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural. Peneliti memfokuskan penelitian pada tahun 2018 di dalam program ini, sebab pada tahun 2018 terdapat sejumlah perkembangan kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang terkait bencana gempa bumi dan tsunami. Pada tahun 2018 juga baru dilaksanakan sosialisasi secara langsung kerumah-rumah warga secara *door to door* dan juga ke sekolah-sekolah serta peningkatan penyediaan infrastruktur yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

Dengan telah adanya beberapa kegiatan dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini tentu diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki budaya siaga terhadap potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami atau paling tidak memiliki pengetahuan terhadap bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Namun pada kenyataannya beberapa kegiatan di dalam program ini belum begitu berdampak terhadap kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dan juga nampaknya belum

berhasil membuat masyarakat memahami dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana gempa terjadi, padahal dengan adanya beberapa kegiatan dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini seharusnya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Padang akan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.

Hasil dari beberapa kegiatan peningkatan kesiapsiagaan yang dilakukan belum menyeluruh menyentuh seluruh kalangan masyarakat dan pengawasan terhadap program yang telah dilakukan belum maksimal dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Menurut hasil survey dan analisis kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang bersama PT DRR Indonesia terhadap masyarakat yang berada di daerah zona merah, yang berlaku mulai tahun 2017 hingga tahun 2021, dapat dilihat indeks kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang di kecamatan yang berada di daerah zona merah akan bencana gempa bumi dan tsunami sebagai berikut :

Tabel 1.9
Rekapan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Kecamatan yang berada di daerah zona merah Kota Padang

Kecamatan	Nilai kesiapsiagaan		Indeks kesiapsiagaan	
	Gempa bumi	Tsunami	Gempa Bumi	Tsunami
Bungus teluk kabung	0,47	0,47	Rendah	Rendah
Koto Tengah	0,53	0,54	Sedang	Sedang
Padang Barat	0,42	0,46	Rendah	Rendah
Padang Selatan	0,54	0,55	Sedang	Sedang
Padang Timur	0,42	0,34	Rendah	Rendah
Padang Utara	0,47	0,46	Rendah	Rendah
Lubuk Begalung	0,43	0,18	Rendah	Rendah

Sumber : Dokumen laporan hasil kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang tahun 2018

Dari tabel 1.9 dapat dilihat bahwa dari enam kecamatan yang berada di zona merah hanya 2 kecamatan yang memiliki indeks kesiapsiagaan sedang pada

bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang dan empat kecamatan lainnya masih rendah. Penilaian ini dilihat melalui empat indikator yaitu pengetahuan kebencanaan, sistem peringatan dini, perencanaan evakuasi dan kapasitas penanganan krisis. Selain dari penelitian tersebut pada tahun 2016, menurut penelitian LIPI menemukan tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang hanya 56% dan survei BNPB yang dilakukan pada tahun 2013 tentang indeks pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang, menggambarkan dari 10 desa/kelurahan yang disurvei hanya 2 desa/kelurahan yang berada pada kategori sedang, 8 sisanya berada pada kategori rendah.

Adanya rentan waktu penelitian LIPI (2006) dan Survei BNPB 2013 serta BPBD bersama lembaga DRR tahun 2017 seharusnya bisa dimanfaatkan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun kenyataannya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang belum begitu mengalami peningkatan. Padahal upaya peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu amanat dari Deklarasi Hyogo 2005-2015 tentang pentingnya peningkatan kesiapsiagaan disegala level dalam pengurangan resiko bencana, termasuk kesiapsiagaan masyarakat.²²

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa meskipun warga kota Padang sudah terbiasa akan bencana gempa di Kota Padang, namun warga masih belum mempunyai pengetahuan terhadap apa yang sudah disosialisasikan oleh BPBD Kota Padang melalui Program-programnya. Masyarakat Kota Padang tetap panik dan bahkan tidak melakukan langkah preventif sebelum bencana terjadi. Menurut

²² *Ibid* Novert hlm 16

salah satu LSM yang bergerak di bidang kebencanaan di Kota Padang Komunitas Siaga Tsunami kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang terhadap bencana gempa bumi dan tsunami masih rendah. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

“... Program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang saat ini sebenarnya telah mulai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang hanya saja dalam pelaksanaan kegiatannya masih belum begitu optimal. mungkin belum sampai 50% dari masyarakat kita yang bisa dikatakan memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, apalagi untuk yang tinggal di zona merah. sebenarnya untuk menilai masyarakat Kota Padang telah memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami itu bisa dilihat dari apakah masyarakat sudah memiliki rencana evakuasi keluarga, tau kemana jalur evakuasi atau daerah yang aman yang akan dituju dan titik kumpul keluarga ketika pada saat kejadian keluarga terpisah-pisah. Namun sampai saat ini masyarakat Kota Padang masih belum punya pengetahuan tentang itu”²³

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam masih belum begitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami baik itu tentang bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana hingga hal apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Untuk itu, harus ada manajemen yang baik dari BPBD Kota Padang sendiri agar dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan sia-sia begitupun dengan anggaran yang dipakai untuk menjalankan kegiatan.

²³ Wawancara dengan pendiri Komunitas Siaga Tsunami Patra Rina Dewi tanggal 13 Juni 2019

Manajemen menurut Ricky W Griffin merupakan suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi baik manusia, finansial, fisik dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.²⁴ Dalam manajemen ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan. Tahap awal yang dilakukan dalam manajemen menurut griffin adalah perencanaan dan pengambilan keputusan dimana pada tahap ini proses menetapkan tujuan organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

Perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam program ini dilakukan oleh BPBD Kota bersama pihak yang terkait yaitu Kepala Pelaksana BPBD dan juga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang. Namun dalam melakukan perencanaan yang dibuat pada beberapa kegiatan masih terkendala pada dana sehingga membuat beberapa kegiatan sulit terlaksana dengan optimal seperti pembuatan batas perkiraan zona aman tsunami dan rambu-rambu evakuasi tsunami yang masih belum begitu mencukupi titik daerah zona merah yang ada di Kota Padang. Anggaran yang tidak cukup juga menghambat dalam melakukan pengembangan perencanaan program ini Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

“... untuk merencanakan beberapa kegiatan di bidang kami ini memang terkendala di anggaran ya, sebenarnya kita ini masih butuh tambahan rambu-rambu evakuasi tsunami serta pemasangan tsunami safe zone untuk di beberapa kelurahan yang rawan akan bencana gempa bumi dan tsunami.

²⁴ Ricky, W. Griffin. 2004. *Manajemen*. Jilid 1. Edisi 7. Jakarta: Erlangga.hal 9

itu juga berimbas pada sulitnya nanti warga mengevakuasi diri ketika terjadi bencana”²⁵

Fenomena dalam proses perencanaan juga terlihat dari kurangnya keterlibatan aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini dan juga beberapa kegiatan yang tidak menggunakan dokumen acuan kerja serta kurangnya dalam mengelola pencapaian tujuan dari setiap kegiatan. Sedangkan menurut Griffin dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan harus dilakukan oleh pihak yang langsung terlibat dan setiap pencapaian tujuan dari kegiatan harus dilakukan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Kasubag Program BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“...dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami ini pihak yang seharusnya terlibat yaitu kepala bidang sendiri kurang ikut terlibat, banyak diserahkan sebagian program saja. Sehingga apa yang akan kita rencanakan untuk kedepan itu kurang optimal, seperti apa yang seharusnya dilakukan, kegiatan apa yang penting dilakukan, cara pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut bagaimana itu tidak ada kita diskusikan bersama. Sehingga beberapa pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan atau KAK ini dibuat ketika kegiatan mau dilaksanakan bukan tahun sebelumnya kan harusnya diakhir tahun itu dibuat KAK nya tapi ini enggak ditahun berjalan kadang dibuat”²⁶

Dari dua kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya perencanaan dari beberapa kegiatan di dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini sehingga berdampak pada proses pencapaian tujuan program. Untuk merealisasikan perencanaan, dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak dari rencana tersebut.

²⁵ Wawancara peneliti dengan kasubag keuangan BPBD Kota Padang bapak Ir. Sofyan pada tanggal 14 april 2019

²⁶ wawancara peneliti dengan Kasubag Program BPBD Kota Padang bapak Robby Alfian S.SOS M.CIO pada tanggal 24 mei 2019

Perlunya pembentukan tim kerja untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas yang telah tersusun. Oleh karena itu sangat diperlukan pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Griffin yaitu menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya.

Dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini di fase pra bencana pengorganisasian dibutuhkan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dan juga sumber daya yang bertanggung jawab sebagai pelaksana. Pemilihan sumber daya yang tepat untuk berperan dalam pelaksanaan sangat menentukan hasil akhir yang diperoleh nantinya. Dalam pelaksanaan kegiatannya pada program ini dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan . Selain itu, untuk melaksanakan 11 kegiatan yang ada di fase pra bencana ini BPBD juga melibatkan beberapa NGO dan LSM di bidang kebencanaan seperti kogami, DRR, Jemari sekato, dan kelompok relawan dari masyarakat yaitu Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kelurahan serta pihak rekanan sebagai mitra kerja BPBD dan juga untuk membantu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut.

Dari semua pihak yang terlibat tersebut dalam pelaksanaan ini tentu dibutuhkan koordinasi dan pembagian kerja yang baik terhadap semua stakeholder pelaksana kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Griffin menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu program atau kegiatan, perlunya penetapan sumber daya yang tepat dari segi kemampuan dan juga koordinasi yang baik antar sesama pekerja. Namun dalam hal ini beberapa dari aktor yang terlibat baik pegawai internal BPBD hingga

tenaga relawan yang bekerja di lapangan kurang memiliki kemampuan dalam mengedukasi masyarakat. Dan juga dalam kuantitas pekerja yang ada di bidang pencegahan ini masing-masing dirasa kurang dalam menjalankan 11 kegiatan pada program ini di fase pra bencana. Hal tersebut disampaikan oleh kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Padang.

“... sistem pembagian kerja dalam program ini sedikit mengalami kesulitan karena di bidang ini jumlah kami hanya 11 orang dan beban kerja kami sangat banyak ditambah pula tidak semua pegawai disini memiliki keahlian dalam mengelola kegiatan kebencanaan. Untuk tenaga fasilitator yang berasal dari relawan KSB, paling yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengerjakan tugasnya secara benar hanya 10% jadi kami agak sulit bagaimana menentukan anggota KSB yang memiliki kemampuan dalam mengedukasi masyarakat untuk bisa dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan kami hal itu juga karena dalam proses perekrutan anggota relawan ini yang tidak ditentukan spesifikasinya. Koordinasi yang terbentuk dengan pihak pelaksana teknis kegiatan juga kurang ya hal tersebut juga kadang membuat kita sendiri tidak tau ya sejauh mana keberhasilan dari setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh pelaksana teknis kegiatan. Koordinasi yang kurang terjadi pada kegiatan rapat koordinasi kebencanaan dimana masalah atau kendala kebencanaan di tingkat kelurahan tidak dilakukan dan tidak sampai pada tingkat Kota”²⁷

Hal ini juga disampaikan oleh ketua KSB Kelurahan Lolong Belanti sebagai berikut:

“...Tidak adanya koordinasi dalam pemasangan rambu-rambu evakuasi dengan kami sehingga kami tidak mengetahui adanya pemasangan rambu-rambu di daerah kami dan daerah seharusnya dipasang rambu-rambu tidak dipasang, kalau diberi tau kan kami bisa mengarahkan karena kami yang tau titik mana yang paling rawan dan rambu-rambu mana yang harus di perbaiki atau dipindahkan ...”²⁸

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesulitan dalam proses pengorganisasian dimana dari segi kualitas dan kuantitas para pegawai baik

²⁷ Wawancara peneliti dengan kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Padang bapak Drs. Henry MM pada tanggal 24 Mei 2019

²⁸ Wawancara peneliti dengan ketua KSB Lolong Belanti Alwis pada tanggal 24 Juni 2019

dari internal BPBD dan juga tenaga relawan yang rendah dan kurang. Koordinasi antara *stakeholder* pelaksana kegiatan pun juga kurang. Seharusnya koordinasi ini ditingkatkan agar tujuan dapat tercapai dengan optimal.

Selanjutnya yang juga berpengaruh dalam proses manajemen adalah kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Griffin yaitu memotivasi anggota organisasi untuk bekerja bagi kepentingan organisasi. Perilaku dan sikap seorang pemimpin sedikit banyaknya berpengaruh pada bawahan dan juga kinerja yang dihasilkan. Seorang pemimpin memiliki peran besar dalam suatu organisasi, karena pemimpin menjadi acuan bagi bawahan dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan program ini dipimpin oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang berada dibawah pimpinan kepala pelaksana BPBD Kota Padang. BPBD sebagai badan yang memiliki unsur pelaksana, koordinasi, dan komando harus mampu menggerakkan para pegawai dan bahwan agar bekerja sesuai yang telah direncanakan sehingga tercapainya tujuan dan menciptakan komunikasi yang baik. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Griffin bahwa pemimpin merupakan aktor penggerak yang harus mampu mempengaruhi, mendorong para pelaksana kegiatan untuk bergerak maju dalam bekerja dan mengembangkan organisasi. Dalam fungsi ini adanya pemberian motivasi oleh pemimpin dan menentukan arah dan tujuan dari setiap pelaksanaan kegiatan bagi setiap pelaksana kegiatan oleh kepala pelaksana BPBD dan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang:

“...cara kami mengkomunikasikan arahan yang telah diperoleh adalah dengan adanya rapat sebelum bekerja atau secara tidak

langsung dengan media grup di *whatsup* kepada panitia pelaksana kegiatan. saya juga memberikan arahan setiap minggunya kepada para pegawai tentang bagaimana pencapaian visi misi kita. Selain itu kita juga ada *coffe morning* setiap bulannya. Disana kita mengumpulkan insan kebencanaan dan pelaksana kegiatan dari beberapa *stakeholder* baik NGO maupun relawan dan menyampaikan visi misi kita serta kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama-sama dalam mengurangi risiko bencana gempa bumi dan tsunami. kalau motivasi tentu ada, baik berupa pujian dan juga uang jalan bagi pelaksana kegiatan kita yang berasal dari relawan atau NGO agar mereka bekerja dengan semangat dan tujuan kegiatan kita tercapai”²⁹

Namun disini masih ditemukan komunikasi yang kurang optimal dimana dalam beberapa pelaksanaan kegiatan tidak dikomunikasikan dengan baik hal tersebut disampaikan oleh Staf Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang :

“... kadang kami sebagai staf juga ada konflik dengan kabid misalnya ya ketika saran dan tanggapan kami atas permasalahan di lapangan kadang tidak ditanggapi dengan baik, kami hanya bekerja sesuai perintah saja. Jadi ya gitu proses komunikasi yang kurang baik ini kadang menghambat setiap pencapaian tujuan tiap pelaksanaan kegiatan.”³⁰

Dari dua kutipan tersebut dapat dilihat bahwa masing kurangnya peran pemimpin dalam menggerakkan para pegawai dan tim kerja serta sistem komunikasi yang tunggal yang mengakibatkan terkadang terjadinya konflik antara pegawai dan pimpinan. Tahapan terakhir adalah pengendalian. Pengendalian dibutuhkan saat semua perencanaan sudah dilaksanakan. Tujuan dari pengendalian yaitu agar aktivitas yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya. Pelaksanaan kerja perlu diawasi dan dipantau untuk melihat perkembangan dari pekerjaan yang dilakukan. Pengendalian menurut Griffin yaitu memonitor dan

²⁹ wawancara peneliti dengan kepala pelaksana BPBD Kota Padang bapak Dr. H. Edy Hasyimi pada tanggal 24 Desember 2019

³⁰ wawancara peneliti dengan staf kesiapsiagaan BPBD Kota Padang bapak Rezko Yunanda pada tanggal 6 Juni 2019

memperbaiki aktivitas yang berlangsung untuk memastikan pencapaian tujuan. Proses pengendalian dilakukan oleh Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bersama kasi dan staf dengan mengevaluasi capaian per program melalui laporan fisik dan keuangan. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

“... Dalam pengendalian program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini kami melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dengan membuat laporan perkegiatan dan juga mengevaluasi capaian per program baik itu dari realisasi fisik maupun keuangan. Namun yang jadi permasalahan dalam pengawasan ini yaitu kadang bidang-bidang yang ada di BPBD Kota Padang ini terlambat memberikan laporannya sehingga tindakan evaluasi juga terlambat dilakukan bahkan tidak ada. Hal tersebut juga terjadi pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang. kami juga sebenarnya ada menciptakan standar capaian keberhasilan tiap-tiap kegiatan tapi ya kadang dievaluasi kadang tidak jadi kesalahan atau kekurangan di beberapa kegiatan terjadi kembali pada tahun berikutnya.”³¹

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pengendalian yang dilakukan dalam program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini pada fase pra bencana dilakukan dengan mengevaluasi capaian hasil per program yang ada. Griffin menjelaskan bahwa dalam proses pengendalian atas setiap kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan perbaikan dan dicari solusi atas penyimpangan yang terjadi sehingga penyimpangan tersebut tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Namun dalam tindakan pengendalian pada program ini masih terkendala pada keterlambatan memberikan laporan sehingga evaluasi pun juga terlambat dan bahkan tidak ada. Selain itu kurangnya tindakan perbaikan atas penyimpangan

³¹ wawancara dengan sub bagian program BPBD Kota Padang bapak Roby Alfian S.SOS M.CIO pada tanggal 24 Mei 2019

atau kekurangan atas setiap pelaksanaan kegiatan membuat kesalahan yang sama terjadi pada tahun berikutnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan salah seorang warga di kawasan Kelurahan lolong belanti Kota Padang yang mendapat sosialisasi dari BPBD Kota Padang.

“... ibuk tidak begitu paham sebenarnya bagaimana cara penyelamatan diri yang benar ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. kalau sosialisasi memang pernah ada orang KSB yang datang kerumah cuman ya mereka hanya membagikan poster dan stiker saja tidak menyampaikan begitu rinci cara-cara menyelamatkan diri dan hanya sebentar waktunya jadi kami tidak sempat bertanya-tanya tentang cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ini. rambu-rambu evakuasi tsunami disekitaran daerah ini juga tidak banyak dan ada juga yang rusak. Apalagi daerah aman tsunami saya taunya daerah yang aman itu di daerah bypass ke atas. Batas perkiraan zona aman tsunami sendiri saya juga tidak tau karna tidak dijelaskan secara rinci dimana saja daerahnya”³²

Senada dengan kutipan wawancara tersebut juga dijelaskan oleh salah satu pelaksana kegiatan sekolah cerdas bencana sebagai berikut:

“... ya memang tidak ada evaluasi atau tindakan perbaikan atas kegiatan yang kita lakukan, contohnya kegiatan di tahun 2018 itu banyak yang bentrok jadwalnya dengan jadwal ujian sekolah, selain itu kita juga tidak tau apakah sekolah yang kita edukasi itu melakukan kembali secara mandiri kegiatannya di tahun berikutnya”³³

Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mitigasi bencana gempa bumi dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim fasilitator KSB setempat yang dimandatkan oleh BPBD Kota Padang untuk mengedukasi para keluarga atau masyarakat tentang mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami masih belum berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang ada. Disini peneliti

³² wawancara peneliti dengan warga Lolong Belanti ibuk Yusnani pada tanggal 8 Maret 2019 ³³ wawancara peneliti dengan fasilitator kegiatan sekolah cerdas bencana dari DRRI bapak Halomon pada tanggal 16 Oktober 2019

melihat bahwa terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Padahal sebelumnya para anggota KSB ini diberikan pelatihan terlebih dahulu hanya saja dalam proses pelatihan ini masih belum bisa berjalan dengan optimal. Hal tersebut dijelaskan oleh fasilitator pelatihan:

“... kadang yang mengakibatkan penyimpangan itu terjadi karena BPBD sendiri tidak menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi padahal mereka sebenarnya sudah tau karena saya sudah menyampaikannya ketika rapat proses pelatihan KSB sehingga perlu dicari akar permasalahannya dimana apakah di proses pelatihannya yang kurang optimal sehingga mengakibatkan para KSB ini tidak memiliki kapasitas dalam menyampaikan materi edukasi ke masyarakat, selain itu saya lihat juga pemasangan tsunami safe zone atau batas perkiraan zona aman tsunami juga tidak diperhatikan dalam pemasangannya sehingga banyak yang sudah kabur atau tidak jelas sehingga masyarakat juga tidak tau apa itu tsunami safe zone. Seharusnya ya menurut saya harus ada sanksi yang tegas dari BPBD sendiri sebagai leading sektor pelaksanaan program kepada pelaksana kegiatan sehingga jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dilakukan di lapangan dengan perencanaan atau tujuan kegiatan mereka bisa diberikan sanksi dan masalah yang terjadi ini tidak terjadi kembali lagi”³⁴

Dari beberapa permasalahan dalam proses manajemen dari Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam pada fase pra bencana ini tentunya diperlukan manajemen yang baik dan matang agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran program dapat terwujud dengan optimal. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi BPBD Kota Padang dalam melaksanakan Program Pengurangan risiko bencana ini, yang antara lain masih terdapat beberapa kendala seperti masih minimnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang.

³⁴ wawancara peneliti dengan Patra Rina Dewi fasilitator atau pelatih dalam pelatihan KSB pada tanggal 13 juni 2019

Untuk mengetahui bagaimana manajemen dari program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ini peneliti menggunakan teori Ricky W Griffin dikarenakan fenomena teoritis yang peneliti temukan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen menurut Griffin, dimana dalam hal ini teori griffin lebih menekankan bagaimana kepemimpinan atau cara seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya dalam bekerja. BPBD sebagai badan yang memiliki unsur pelaksana, koordinasi, dan komando harus mampu menggerakkan para pegawai dan bahwan agar bekerja sesuai yang telah direncanakan sehingga tercapainya tujuan dan menciptakan komunikasi yang baik. Selain itu peran pemimpin dalam melaksanakan program ini sangat penting dikarenakan dalam melaksanakan program ini BPBD tidak hanya sendiri melainkan melibatkan banyak stakeholder baik dari NGO kebencanaan hingga tenaga relawan dari kelurahan sehingga komunikasi dan arahan yang baik sangat diperlukan. Berdasarkan fenomena-fenomena empiris yang peneliti temukan dilapangan, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana **Manajemen Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ?**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Manajemen Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan Manajemen Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu terbagi dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang guna dalam pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik terutama dalam Manajemen suatu organisasi publik juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

